



Pemda Dinilai Tak Becus Negara Merugi Rp726,4 M

JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian keuangan di daerah sebesar Rp726,4 miliar dalam laporan hasil pemeriksaannya, semester II tahun 2012. Indikasi ini disinyalir akibat dari ketidakbecusan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran belanja modal untuk fasilitas umum.

"Belanja modal fasilitas umum itu (seharusnya) dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan dan irigasi," ujar Maulana, Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fi-

Kaltim dan Kalsei
Lima Besar Provinsi Terkorup



tra) dalam jumpa pers di Cava Cafe, Cikini Jakarta, Minggu (23/6).

Ia membeberkan, ketidakpatuhan pengelolaan anggaran yang terindikasi kerugian keuangan daerah ada 730 kasus dengan nilai Rp 417.889.350, lalu potensi kerugian daerah ada 273 kasus dengan nilai Rp 225.878.780. Kemudian, kekurangan penerimaan jumlah kasusnya 306 dengan nominal Rp 82.647.110. Bila ditotal, sebanyak 1.309 kasus berjumlah Rp 726.415.240.000.

■ Halaman 7



Pemda Dinilaidari halaman 1

Kerugian tersebut akibat modus yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pengadaan fiktif, mark up, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak.

"Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan lelang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Penetapan rekanan pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan dengan proses seleksi yang baik. Pemerintah daerah lebih mengedepankan penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan barang dan jasa," tegas Maulana.

Ia lantas meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatasi dana transfer ke daerah yang berbentuk belanja modal fasilitas umum. Terutama, untuk daerah-daerah yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran. Hal ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait indikasi kerugian negara akibat penyimpangan belanja modal untuk fasilitas umum di lima provinsi senilai miliaran rupiah. "Presiden SBY hanya

berhasil mengurus ekonomi di luar negeri. Sementara dalam negeri di daerah-daerah, banyak ketimpangan seperti ini," ujar Maulana.

Menurut dia, dari hasil laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2012 BPK, tercatat bahwa penggunaan anggaran untuk belanja fasilitas umum yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan dan irigasi cenderung diselewengkan dengan modus beragam.

Diantaranya, sambung dia, pengadaan fiktif, markup (penggelembungan) harga, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi, spesifikasi barang tidak sesuai kontrak. "Ada sekitar 1309 temuan dugaan penyimpangan dengan indikasi kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 726,4 miliar," ungkap Maulana.

Karena penggunaan dana yang diduga menyimpang ini, FITRA juga meminta pemerintah daerah agar memberhentikan pejabat pengadaan barang dan jasa serta kuasa pengguna anggaran yang tidak becus menyeleksi rekanan pekerjaan/ proyek di wilayah masing-masing.

Lima Provinsi Terkorup

Selain itu, Fitra juga membeberkan lima provinsi yang terindikasi paling korup dalam belanja modal untuk fasilitas umum. "Di Provinsi Papua Barat terdapat sepuluh kasus penyelewengan dana daerah dengan nilai Rp 86,793 miliar," tambah Uchok Sky Khadafi ujar Koordinator Seknas Fitra pada kesempatan yang sama.

Urutan kedua ditempati Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kasus dengan nilai kerugian negara Rp 26,631 miliar. Sementara tempat ketiga, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dengan delapan kasus senilai Rp 10,841 miliar.

Menurut Uchok, modus penyimpangan paling banyak terjadi antara lain seperti pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara. "Urutan keempat ada Provinsi Aceh dengan 18 kasus senilai Rp 7,830 miliar," ungkapnya.

Uchok menambahkan, provinsi dengan penyelewengan terbanyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 28 kasus. Di mana terindikasi kerugian negara senilai Rp 5,773 miliar.

Re-editing: Julianus Ratno